



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDAH ARUNI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN**
3. NHK : **220491**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.870.722.000**

1. Tanah Seluas 97 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/40 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 10.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000
5. Tanah Seluas 66 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/21 m2 di KAB / KOTA
SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/21 m2 di KAB / KOTA
SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 590.568.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/70 m2 di KAB / KOTA
SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 213.954.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/140 m2 di KAB / KOTA
SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 72.200.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA
SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	238.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	81.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.193.222.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.193.222.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.